BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah faktor paling penting dalam setiap usaha untuk memecahkan permasalahan kependudukan dan masalah-masalah yang terkait dengan yang harus diberi perioritas dalam setiap usaha nasional maupun internasional untuk melaksanakan program - program kependudukan dan pembanguna secara terpadu.[1]

Menurut Meier yang ditulis dalam buku Subandi (2012) bahwa, pembangunan ekonomi yaitu suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Proses pembangunan ekonomi menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan.

[1]Michel P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang, Suatu Pengantar Tentang Prinsip-prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 274

menurut beberapa pakar, pembangunan ekonomi dan politik, masyarakat bangsa-bangsa dapat diklasifikasikan secara sosiologis kedalam tiga katagori, pertama adalah masyarakat yang masih bersifat tradisional, kedua adalah masyarakat yang bersifat peralihan (transisional), dan ketiga adalah masyarakat yang sudah maju (modern). Namun demikian klafikasi tersebut memuat berbagai variasi, misalnya ada masyarakat bangsa-bangsa tertentu yang telah mempunyai sektor kehidupan maju, tetapi di lain pihak ada wilayah-wilayah kehidupan dalam masyarakat yang masih bersifat tradisional.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran, yang ditunjukan peningkatan pendapataan perkapita dalam jangka panjang. Seperti kita ketahui bersama bahwa tingkat kehidupan sebagai besar penduduk di Negara Berkembang relatif masih rendah.[2]

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pada negara berkembang tentunya tidak semudah yang diharapkan, karena

[2]Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 9

ada berbagai persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dari zaman kemerdekaan sampai saat ini (masa reformasi) juga mengalami hal yang demikian.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, karena Negara Indonesia belum terlepas dari masalah-masalah yang dialami oleh Negara berkembang. Diantaranya yaitu, akses pendidikan dan kesejahteraan yang belum merata, infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah, dan tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan kurangnya pemerataan pendapatan. Selain itu Negara Indonesia memiliki perbedaan sumber daya alam yang terdapat pada masing-masing wilayah. Pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju *(developed region)* dan wilayah berkembang *(underdeveloped region)*.

Pembangun wilayah dipandang sebagai proses perubahan. Perlunya pemahaman tentang aspek keseimbangan kebutuhan antarwilayah dan antara dimensi waktu (masa sekarang dan masa depan). Pembangunan wilayah harus

mampu menghadapi berbagai keterbatasan terkait: pengusahan teknologi, organisasi sosial, dan lingkungan hidup (*biosfir*). Pembangunan wilayah harus mampu meningkatkan, pendapatan rill, standar pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara umum.[3]

Walaupun sangat disadari bahwa proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, namun demikian sedemikian jauh pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan di sini dapat berbentuk Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di samping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan, target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh

---

[3]Susanto dkk, *Reivensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah* (Jakarta,Erlangga Grup,2010), 85

masing-masing wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula ditinggalkan.

Perhatian terhadap pertumbuhan wilayah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi tersebut masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonominya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat.[4]

Pada era otonomi daerah ini pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia menghadapi persoalan dalam membangun ekonomi daerahnya. Dalam menghadapi persoalan pembangunan ekonomi maka suatu daerah harus membangun perekonomian yang memiliki daya saing dan efesien. Pada era otonomi daerah ini maka program pembangunan ekonominya harus disentralistis dan memiliki daya saing, sehingga cangkupannya lebih luas dan tidak hanya

[4]Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88

sekedar pembangunan ekonomi daerah.[5] Suatu daerah adalah suatu ruang ekonomi yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti suatu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan sebagainya. Jadi, daerah di sini di dasarkan atas pembagian administratif suatu negara.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintahan dan masyarakat mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kementrian antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique voule*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal

[5] Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 140

(daerah).[6] Maka hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antara wilayah.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketipangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat atara wilayah. Dalam hal tersbut, aspek ketimpangan pembangunan antara wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.[7]

Melalui Undang-undang No. 23 tahun 2000, status keresidenan Banten Provinsi Jawa Barat berubah menjadi

---

[6]Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN, 2010), 374

[7] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 104

Provinsi Banten dan merupakan Provinsi yang ke 30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari empat Kapubaten dan dua Kota, kemudian terjadi pemekaran pada Kabupaten Serang dan Kabupaten Tanggerang sehingga Provinsi Banten menjadi empat Kabupaten dan empat Kota yang meliputi : Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tanggerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan. Dan Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan seperti apa yang telah dialami oleh negara sedang berkembang lainnya.

Menurut M. P. Todaro (2013) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendpatan nasional yang semakin besar.[8] Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat. Dimana ketika suatu wilayah

[8]*http://www.sarjanaku.com/2013/06/pengertian-pertumbuhan/ekonomi-definisi.html?m=1* (diunduh tanggal 01 september 2017)

memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi maka wilayah tersebut dinamakan wilayah makmur (maju). Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi ragional, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi ragional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah.[9] Berikut adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,88	6,24
Jawa Barat	6,50	6,50	6,33	5,09	5,03	5,89
Jawa Tengah	5,30	5,34	5,11	5,28	5,44	5,29
DIY	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5.23
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	6,09
Banten	**7,03**	**6,83**	**6,67**	**5,47**	**5,37**	**6,27**

Sumber : BPS Statistik Provinsi Banten, di olah

[9] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi*(Padang: Baduose Media, 2008), 85

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, dimana Provinsi Banten menempati peringkat pertama dengan jumlah nilai rata-rata 6,27 persen, dan diperingkat kedua ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai rata-rata sebesar 6,24 persen, diperingkat ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 6,09 persen, peringkat ke empat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai rata-rata 5,89 persen, diperingkat kelima ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata 5,29 persen, sedangkan peringkat akhir ditempati oleh Provinsi DIY dengan nilai rata-rata sebesar 5,23 persen.

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang baik diantara Provinsi di Pulau Jawa. Tetapi tidak disertai pemerataan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Ketidakmerataan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan PDRB per kapita.

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2016

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2009-2016							
Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kab Pandeglang	3.985,78	4.321,14	4.547,85	4.810,92	14.415,45	15.108,83	15.996,63	16.875,51
kab Lebak	3.855,54	4.152,21	4.387,62	4.608,62	14.884,60	15.786,75	16.670,89	17.620,57
kab Tangerang	17.382,09	18.549,12	19.725,85	20.804,09	70.388,49	74.101,23	77.782,31	81.923,99
kab Serang	6.851,29	7.135,11	7.536,10	15.827,75	40.246,71	42.541,18	44.425,32	46.646,86
Kota Tangerang	27.562,54	29.402,85	31.414,10	33.433,90	82.125,48	86.590,53	90.811,41	95.621,89
Kota Cilegon	11.580,60	17.111,20	18.228,29	19.470,42	54.796,10	57.433,49	59.996,74	63.028,89
Kota Serang	2.670,70	2.884,23	3.110,51	3.336,74	15.683,99	16.779,00	17.799,01	18.906,10
Kota Tangerang Selatan	4.947,87	5.378,32	5.823,83	6.303,44	39.290,71	42.589,74	45.465,20	48.637,38
Prov Banten	72.031,24	88.525,21	94.206,71	99.992,21	332.517,42	349.205,70	368.216,55	387.595,37

Sumber : BPS Statistik Provinsi Banten, di olah

Gambar 1.1
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011-2015

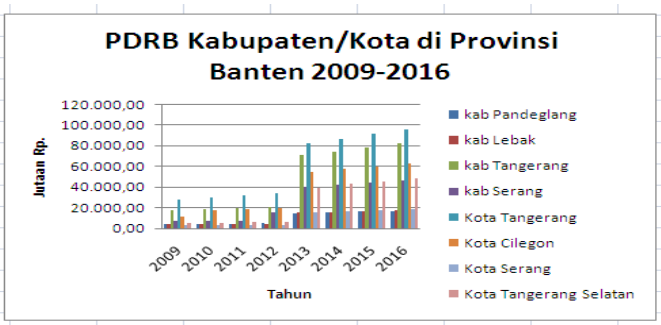

Sumber : BPS Statistik Provinsi Banten, di olah

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memiliki perbedaan. Dimana daerah yang memiliki PDRB per kapita yang paling tinggi adalah Kota Tanggerang dan Kabupaten Tanggerang. Sedangkan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan

Kota Serang memiliki PDRB per kapita yang rendah. Maka gambar 1.1 menunjukan adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Banten. Ketimpangan pembangunan wilayah disebabkan oleh beberapah faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, dikarenakan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam yang cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi tidakmerata, dimana daerah yang memiliki SDA yang lebih tinggi akan memproduksi dengan jumlah yang banyak dan harga yang murah sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat di daerah tersebut dan sebaliknya dimana daerah yang memiliki sumber daya alam lebih kecil hanya akan memproduksi barang-barang dengan biaya produksi yang lebih tinggi sehingga daya saing menjadi lemah.[10]

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembanguna ekonomi disebabkan juga oleh investasi. Investasi adalah

[10]Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 117-118

sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk bertujuan memperoleh keuntungan.[11]

Menurut Sjafrizal (2008) tidak dapat disangkal bahwa investsi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Tidak demikian halnya investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transpor baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk kedalam keuntungan lokasi

---

[11] Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (*Jakarta: Kencana, 2008), 7

ini adalah keuntungan Aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daeraah tertentu. Dalam hal tersebut, tidaklah mengherankan bilamana investasi cederung lebih banyak terkonsentrasi di dareah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dari daerah pedesaan.[12]

Dalam setiap kasus, akumulasi modal tidak lagi dipandang sebagai obat mujarab bagi NSB, meskipun sudah jelas bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkesinambungan dalam jangka panjang hanya dapat tercapai jika masyarakat mampu mempertahankan proposi investasi yang cukup besar dari GDP-nya. Proposi investasi dalam GDP di beberapa NSB sangat jarag kurang dari 15 persen, bahkan pada banyak kasus proposi tersebut dapat mencapai angka 25 persen, semua ini tergantung pada lingkungan di mana akumulasi modal tersebut terjadi dan berapa tingkat

[12] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 121

pertumbuhan ekonomi yang diinginkan untuk dapat mencapai tujuan pokok masyarakat yaitu tingkat kesejahteraan yang lebih baik.[13]

Asal ketidakmerataan ragional dalam suatu Negara berakar pada pada dasar nonekonomi. Ketimpangan ragional berkaitan erat dengan sisitem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini. Menurut Gunnar Myrdal yang ditulis dalam buku Jhingan (2012), bahwa peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan ragional.[14] Berikut ini adalah tabel investasi tahun 2011-2015 di Provinsi Banten.

---

[13] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN, 2010), 187

[14]M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawalii Pers , 2012), 212

Tabel 1.3
Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Banten
Tahun 2011-2015

Tahun	Investasi Swasta	
	PMDN	PMA (Dolar)
2011	2.577.247	9.440.771
2012	2490.285	249.869
2013	3.720.210	4.008.862
2014	8.081.298	2.034.627
2015	10.709.896,40	2.541.969

Sumber : BPS Statistik Provinsi Banten, di olah

Tabel 1.3 menunjukan nilai investasi swasta (PMDN dan PMA) di Provinsi Banten pada tahun 2011-2015 mengalami fluk tuatif. Dimana investasi swasta (PMDN dan PMA) mengalami peningkatan pada tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan, dan pada tiga tahu terhir mengalami peningkatan kembali yaitu pada tahun 2013,2014 dan 2015.

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPS dan perhitungan Indeks Williamson bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten salah satunya di Kabupaten Pandeglang dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 sebesar 5,96 persen dan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 5,49 persen, penurunan tersebut di iringi dengan penurunan

ketimpangan dimana pada tahun 2015 sebesar 0,30 persen dan di tahun 2016 sebesar 0,29 persen. Selain Kabupaten Paneglang, Kota Tangerang mengalami hal yang sebaliknya dimana pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,31 persen dan diikuti dengan peningkatan ketimpangan sebesar 0,4 persen.

Berdasarkan pada latar belakang dan data yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Perhiungan Indeks Williamson, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pemabangunan wilayah, dengan judul sebagai berikut: **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi Swasta Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupten/Kota di Provinsi Banten".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di suatu daerah dapat mengakibatkan ketimpangan pula seperti di Provinsi Banten yaitu:

1. Laju pertumbuhan Provinsi Banten menempati urutan pertama di Pulau jawa.
2. Provinsi Banten memiliki laju pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 6,27 persen.
3. Provinsi Banten memiliki delapan Daerah terdiri dari, empat Kabupaten dan empat Kota, dimana Produk Domestik Ragioanl Bruto (PDRB) yang berbeda-beda sehingga terjadinya ketimpangan antara daerah.
4. Provinsi Banten memiliki perkembangan investasi yang baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS. Pertumbuhan ekonomi yang disertai ketimpangan wilayah merupakan permasalahan dalam pembangunan. Maka itu diperlukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap pengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi penelitian sebagaiman di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten secara induvidu dan Bersama-sama?
2. Berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Kapubaten/Kota di Provinsi Banten selama periode 2009-2016. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Banten secara induvidu dan bersama-sama.

2. Untuk menganalisis seberapah besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Banten.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu dan bagi praktisi, sebagai berikut ini:

1. Kegunaan Bagi Pengembangan Ilmu

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah ketimpangan wilayah serta faktor-faktor yang mempegaruhinya secara emperis, dan diharapakan menjadi rujukan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan masalah yang dikaji dalam penelitin ini.

2. Kegunaan Bagi Penggambilan Kebijakan

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi Banten, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan

wilayah, serta pemerataan ketimpanagan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

F. Kerangka Pemikiran Teoritis

Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di Negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan wilayah juga merupakan masalah yang belum dapat dihapuskan di Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto/GDP) semakin tinggi pendapatan per kapita maka semakin meningkat, hingga meningkatnya pendapatan per kapita pada setiap daerah diharapkan terciptanya pemerataan dan mengurangi ketimpangan.[15]

[15] Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9

Ketimpangan pembangunan wilayah timbul dikarenakan ketidkmerataan pembangunan ekonomi wilayah. Menurut Sjafrizal (2008) ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, dikarenakan ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat adanya perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Menurut Hipotesa Neo-Klasik yang ditulis dalam bukunya Sjafrizal (2008), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antara wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antara wilayah tersebut

akan menurun.[16] Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkuatan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antara daerah.

Bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan ragional cenderung melebar (*Divergence*). Akan tetapi proses pembangunan terus berlanjut, dengan sebaiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setalah negara yang bersangkutan telah maju, maka ketimpangan pembangunan ragional akan berkurang (*Convergence*).[17]

---

[16] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 104-105

[17]Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 99-100

Dalam model ini dapat dicari dalam kurva U terbalik yang dikaitkan dengan nama Kuznets. Kurva Kuznets dianggap memiliki implikasi bahwa ketidmerataan akan bertambah pada masa awal pembangunan dan akan berkurang pada pada masa akhir.[18]

Menurut Harrod-Domar yang ditulis dalam buku Subandi (2018) bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertubuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertubuhan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah.[19] Investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) di masa mendatang.[20]

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini, daerah

---

[18] Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Game Insani Press dan Tazkia Institute, 2000), 36

[19]Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 134

[20] Prathama Rahardja Mandala Manurungun, *Pengatar Ekonomi, Mikroekonomi dan Makroekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 269

yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyedian lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk kesuatu daerah ternyata lebih rendah.[21]

Menurut Gunnar Myrdal yang ditulis dalam buku Jhingan (2012) investasi cenderung menambah ktidakmerataan. Asal ktidakmerataan ragional dalam suatu Negara berakar pada dasar nonekonomi, karena ketimpangan ragional berkaitan erat dengan system kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harap yang tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Dimana peranan bebas kekuatan

[21] Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi* (Padang: Baduose Media, 2008), 120

pasar, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan ragional. Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah, kondisi ini yang menyebabkan daerah perkotaan cenderung lebih cepat dibandingkan dari daerah pedesaan. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin besar.

Sesuai studi emperis yang dilakukan oleh Ni'matush Sholikhah (2011) dimana menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal terhadap disparitas pendapatan. Hasil penelitian Ni'matush Sholikhah menunjukkan bahwa antara pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dan disparitas pendapatan terdapat hubungan positif dan signifikan.

Beradasarkan landasan teori dan tinjauan terhadap penelitaian terdahulu, dapat dibuat sekema pemikiran yang

digunakan sebagai acuan dalam pengujian hipotesi sebagai berikut :

Gambar 2.3
Sekema kerangka pemikiran

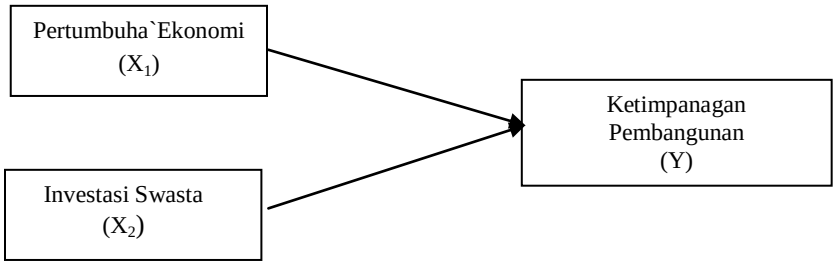

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang perlu di uji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Maka hipotesis sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan secara induvidu dari variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.
2. Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta terhadap pembangunan wilayah.

H. Sistematika Pembahasan

Bab ke - satu, Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab ke - dua, Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang memuat landasan teori yang akan dibahas dalam penelitian, hubungan antara varibel X_1 dan X_2 terhadapa variabel Y, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

Bab ke - tiga, Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta operasional variabel penelitian.

Bab ke - empat, Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, analisis data dan hasil penelitian dengan menggunakan program *Eviews* Versi 10.

Bab ke – lima, Dalam bab ini berisi penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran.